



Pengaruh Pengangguran dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan Melalui IPM sebagai Variabel Intervening: Studi pada 34 Provinsi di Indonesia

Dwie Belcha Nanda Damanik^{1*}, Joko Suharianto²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Korespondensi Penulis: dwieocha5@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the influence of unemployment and the Regional Minimum Wage (UMR) on poverty in 34 provinces in Indonesia with the Human Development Index (HDI) as an intervening variable. The high unemployment rate and minimum wage policy are considered to play a significant role in poverty conditions in the region. This research uses a path analysis approach with panel data from 2018 to 2022. The research results show that the unemployment rate has a positive influence on poverty, while the UMR shows a different influence in each province. HDI is proven to mediate the relationship between unemployment, UMR and poverty. This research contributes to the development of economic science and provides insight for the government and private sector in formulating poverty reduction policies.*

Keywords: *Unemployment, UMR, Poverty, HDI.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening. Tingkat pengangguran yang tinggi dan kebijakan UMR dianggap berperan signifikan terhadap kondisi kemiskinan di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jalur (path analysis) dengan data panel dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan UMR menunjukkan pengaruh yang berbeda di setiap provinsi. IPM terbukti memediasi hubungan antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi dan memberikan wawasan bagi pemerintah dan pihak swasta dalam menyusun kebijakan penurunan kemiskinan.

Kata Kunci: Pengangguran, UMR, Kemiskinan, IPM.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, masalah ini masih tetap ada dan membutuhkan perhatian lebih. Beberapa faktor ekonomi seringkali dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah, di antaranya adalah tingkat pengangguran dan Upah Minimum Regional (UMR).

Tingkat pengangguran mencerminkan rendahnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia produktif, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya pengangguran berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin, karena keterbatasan pendapatan yang mereka miliki.

Di sisi lain, Upah Minimum Regional merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja dari gaji yang terlalu rendah, dengan harapan bahwa pendapatan yang lebih layak dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan. Namun, efektivitas UMR dalam mengurangi kemiskinan juga bergantung pada faktor lain, seperti kondisi pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan material, tetapi juga kemampuan individu dalam mengakses peluang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, IPM berpotensi menjadi variabel intervening yang memediasi hubungan antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan.

Jurnal ini berfokus pada pentingnya mengatasi kemiskinan, yang tetap menjadi tantangan utama di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kemiskinan masih tinggi di banyak provinsi. Pengangguran dan Upah Minimum Regional (UMR) merupakan dua faktor ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Di sisi lain, UMR ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan pendapatan bagi para pekerja, namun dampaknya terhadap kemiskinan tidak selalu konsisten di berbagai daerah.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, juga memainkan peran penting dalam memediasi hubungan antara pengangguran, UMR, dan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana pengangguran dan UMR memengaruhi tingkat kemiskinan dengan IPM sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan adalah estimasi keadaan di mana seseorang tidak memiliki pendapatan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka dianggap hidup dalam kemiskinan (Kuncoro, 2004). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai ketidak berdayaan seseorang atau suatu golongan masyarakat

dalam memperoleh kebutuhan dasar yang layak, meliputi pangan dan non pangan. Alternatif yang digunakan dalam menentukan ukuran suatu kemiskinan adalah dengan membandingkan besaran tingkat konsumsi dengan akumulasi uang yang dibelanjakan orang dalam sebulan atau garis kemiskinan. Apabila tingkat konsumsi seseorang berada dibawah jumlah rata - rata konsumsi normal, dapat dikatakan termasuk dalam katagori miskin.

Menurut Kuncoro (2006) menerangkan bahwa penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu Teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circke of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) adanya keterbelakangan dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercerminkan dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB perkapita).

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan begitu seterusnya. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial. Sehingga kelompok miskin adalah dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena rendahnya penghasilan (Suharto, 2013).

Pengangguran

Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SDtamat SMU) (Putong, 2013).

Ada berbagai jenis pengangguran, seperti pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan setengah menganggur, yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pengangguran terbuka muncul ketika kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan pekerjaan atau penurunan dalam industri tertentu (Sukirno, 2019).

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung

mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (*income poverty rate*) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Upah Minimum Regional

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan atau pendapatan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sebagai bentuk imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan bayaran kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai bentuk imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Ananda, 2012).

Upah Regional Regional merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu (Prasetyo, 2010). Sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam PP No. 8/1981 upah ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, walaupun yang dimiliki oleh setiap daerah sekarang hanya upah minimum regional.

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER01/MEN/1999“tentang upah minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk.I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Akan tetapi sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/200) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK kab/kota) (Zulkifli, 2016).

Kenaikan upah minimum bagi para pekerja akan meningkatkan daya beli mereka yang pada akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Namun bagi perusahaan yang menganggap upah adalah biaya, maka kenaikan upah akan

menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada para pekerja sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Indeks Pembangunan Manusia

Adam Smith mengungkapkan bahwa faktor utama dalam produksi adalah manusia, karena sumber daya alam seperti tanah tidak akan bermanfaat jika tidak dikelola dengan baik oleh manusia. Karena faktor kualitas manusia menjadi komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dan produksi maka dari itu perlu dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia secara maksimal untuk memperoleh hasil produksi dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah metrik yang menilai prestasi pembangunan manusia dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama kualitas hidup yang berpotensi memengaruhi tingkat produktivitas individu (Saputra, 2011). IPM mengevaluasi tiga dimensi utama yang meliputi umur yang panjang dan sehat, mendorong pendidikan dan pengetahuan, dan mempromosikan standar hidup yang memuaskan (Nugroho & Clarissa, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh pengangguran dan UMR terhadap kemiskinan melalui IPM di Indonesia. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel *intervening*, dan dua variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan (Y), variabel *intervening* yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Z), dan variabel independen yang digunakan yaitu pengangguran (X1) dan Upah Minimum Regional (X2).

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan model data panel yang berfokus pada tingkat kemiskinan di setiap provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup data Tingkat Kemiskinan (persentasi penduduk miskin), data IPM (indeks), data Pengangguran (tingkat pengangguran terbuka), dan data UMR (upah minimum dalam rupiah).

Tabel 1. Uji Hipotesis Persamaan Struktural 1 (IPM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.79483	0.585043	107.3337	0.0000
TPT	-0.065931	0.058916	-1.119064	0.2651
UMR	3.505853	0.236944	14.79613	0.0000
Adj. R-squared	0.982795			
F-statistic	276.8135			
Prob.	0.00000			

$$IPM_{it} = 62.79483 - 0.065931TPT + 3.505853UMR + e$$

- 1) Variabel pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar -1.119064 dengan nilai prob. sebesar 0.2651 (>0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel IPM. (H0)
- 2) Nilai Koefisien variabel pengangguran sebesar -0.065931 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel IPM, dimana bertambahnya angka pengangguran sebesar 1% akan berakibat pada penurunan IPM sebesar 6.59 indeks.
- 3) Variabel UMR memiliki nilai t-hitung sebesar 14.79613 dengan nilai prob. sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM. (H1)
- 4) Nilai Koefisien variabel UMR sebesar 3.505853 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh positif terhadap variabel IPM, dimana bertambahnya angka UMR sebesar 1jt rupiah akan berakibat pada peningkatan IPM sebesar 350.58 indeks.
- 5) Nilai F-statistic sebesar 276.8135 dengan nilai prob. sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran dan UMR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM.
- 6) Berdasarkan nilai Adj. E-square sebesar 0.982795, dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran dan UMR secara bersama-sama memengaruhi IPM sebesar 98,27% dalam penelitian ini.

Tabel 2. Uji Hipotesis Persamaan Struktural 2 (Kemiskinan)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.856984	0.5502407	13.64826	0.0000
TPT	0.018178	0.005450	3.335153	0.0011
UMR	0.102650	0.035409	2.899007	0.0044
IPM	-0.016689	0.007955	-2.098078	0.0378
Adj. R-squared	0.997942			
F-statistic	2276.956			
Prob.	0.0000			

$$K_{it} = 6.856984 + 0.018178TPT + 0.102650UMR - 0.016689IPM + e$$

- 1) Variabel pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar 3.335153 dengan nilai prob. sebesar 0.0011 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. (H1)
- 2) Nilai Koefisien variabel pengangguran sebesar 0.018178 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, dimana bertambahnya angka pengangguran sebesar 1% akan berakibat pada peningkatan kemiskinan sebesar 1,81%.
- 3) Variabel UMR memiliki nilai t-hitung sebesar 2.899007 dengan nilai prob. sebesar 0.0044 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. (H1)
- 4) Nilai Koefisien variabel UMR sebesar 0.102650 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, dimana bertambahnya angka UMR sebesar 1jt rupiah akan berakibat pada peningkatan kemiskinan sebesar 10.26%.
- 5) Variabel IPM memiliki nilai t-hitung sebesar 2.098078 dengan nilai prob. sebesar 0.0378(<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. (H1)
- 6) Nilai Koefisien variabel IPM sebesar -0.016689 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan, dimana bertambahnya indeks IPM sebesar 1 indeks akan berakibat pada penurunan kemiskinan sebesar 1,66%.

Tabel 3. Uji Sobel

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.065931	Sobel test: 0.98737877	0.00111439	0.32345699
b	-0.016689	Aroian test: 0.91016056	0.00120893	0.36273784
s _a	0.058916	Goodman test: 1.08830783	0.00101104	0.27645924
s _b	0.007955	Reset all	Calculate	

- 1) Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan melalui IPM

Variabel Pengangguran memiliki nilai t-hitung sebesar 0.98737877 dengan nilai prob. sebesar 0.3234 (<1.96) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan melalui IPM. (H1)

2) Pengaruh UMR terhadap Kemiskinan melalui IPM

Tabel 4. Uji Sobel

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	3.505853	Sobel test: -2.07715013	0.02816801	0.03778771
b	-0.016689	Aroian test: -2.07251522	0.028231	0.03821742
s _a	0.236944	Goodman test: -2.08181628	0.02810487	0.03735925
s _b	0.007955	Reset all	Calculate	

Variabel UMR memiliki nilai t-hitung sebesar 2.0771 dengan nilai prob. sebesar 0.0377 (<1.96) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan melalui IPM.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan komprehensif mengenai bagaimana pengangguran, Upah Minimum Regional (UMR), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saling berinteraksi memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan menganalisis data panel dari 34 provinsi selama periode 2018-2024, penelitian ini mengungkap bahwa pengangguran memiliki dampak positif signifikan terhadap kemiskinan. Setiap kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% secara langsung meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 1,81%. Hal ini mencerminkan bahwa keterbatasan kesempatan kerja menjadi ancaman nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Di sisi lain, UMR menunjukkan hubungan yang lebih kompleks. Secara langsung, peningkatan UMR turut meningkatkan tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum dapat membebani sektor tenaga kerja tertentu, terutama di daerah dengan ketergantungan tinggi pada pekerjaan informal. Namun, melalui IPM sebagai variabel mediasi, UMR terbukti memiliki efek positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara tidak langsung.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan UMR tanpa mempertimbangkan aspek pengangguran dan IPM berpotensi menciptakan hasil yang tidak merata. Oleh karena itu pemerintah perlu memprioritaskan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di provinsi yang IPM-nya masih berada di bawah rata-rata nasional. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan bagi sektor swasta dan pengusaha untuk merancang kebijakan pengupahan yang adil dan seimbang. Dengan memahami dampak langsung dan tidak langsung dari UMR terhadap

kemiskinan, mereka dapat menciptakan sistem pengupahan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya menjadi kontributor penting dalam literatur ekonomi pembangunan, tetapi juga memberikan panduan strategis bagi pembuat kebijakan. Dengan memadukan kebijakan pengurangan/pengangguran, pengaturan UMR yang bijak, dan peningkatan IPM secara simultan, Indonesia dapat lebih efektif mengatasi kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed methods procedures*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometric*. McGraw-Hill.
- Karisma, A., & Soejoto, A. (2010). Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Ekonomi dan Bisnis*, 1–15.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi daerah dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika pembangunan: Teori, masalah dan kebijakan*. UUP STIM YKPN.
- Kusbianto, H., & Silalahi, D. H. (2020). *Hukum perburuhan*. Enam Media.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumbantobing, C. E. R. (2021). *Penelitian bisnis: Teknik dan analisis data dengan SPSS-STATA-EVIEWS* (1st ed.). Madenatera.
- Nugroho, A., & Clarissa, A. (2019). *Indeks pembangunan manusia 2019*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Putong, I. (2013). *Economics: Pengantar mikro dan makro*. Mitra Wacana Media.
- Rianto, N. (2010). *Teori makroekonomi Islam: Konsep, teori dan analisis*. Alfabeta.
- Sajogyo. (1996). *Memahami dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saputra, W. A. (2011). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.

- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Alfabeta. <https://doi.org/978-602-8361-26-2>
- Sukirno, S. (2014). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Kencana.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi teori pengantar*. Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Pearson.
- Umar, H. (2008). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Raja Grafindo Persada.